



Murid Sekolah Dasar di Cirebon mempraktikan pembelajaran numerasi menggunakan kelereng.
(© Edy Purnomo/INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Responsif Perubahan Iklim di Kabupaten Cirebon

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Cirebon: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Kondisi lingkungan belajar di Kabupaten Cirebon

Penguasaan kemampuan dasar murid di Kabupaten Cirebon yang masih kurang memadai turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah belum sepenuhnya menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan pendidikan

Faktor utama yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Cirebon meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, khususnya kekerasan berbasis gender, perlakuan terhadap murid yang didasari stereotip gender tradisional, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, terbatasnya kesadaran dan pengetahuan mengenai isu dan dampak perubahan iklim.



Rekomendasi

Penting bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera mengambil langkah nyata. INOVASI memberikan beberapa usulan rekomendasi untuk dipertimbangkan yang disusun berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan daerah pada pemetaan kesenjangan kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial dan perubahan iklim¹. Rekomendasi tersebut antara lain:

- (1) menguatkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif di sekolah,
- (2) mendorong praktik pendidikan inklusif yang mengakomodasi murid disabilitas
- (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

¹ GEDSIIC Analysis INOVASI Bersama Pemangku Kepentingan Daerah Kabupaten Cirebon pada Oktober 2024

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Cirebon masih di bawah rata-rata Jawa Barat (Kemendikbud, 2022).

Skor literasi: Laki-Laki 48,36; Perempuan 52,95

Skor numerasi: Laki-laki 36,91; Perempuan 38,73

Kesenjangan gender: Murid perempuan konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibanding murid laki-laki.

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar dua poin dari nilai rata-rata literasi dan numerasi provinsi. Data juga menunjukkan kesenjangan gender di mana murid perempuan konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibanding murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar murid dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah bisa menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Cirebon, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Temuan Utama

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Cirebon meliputi:



Kesetaraan gender

Sebanyak 2-4 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah; di mana angka kekerasan terhadap murid perempuan lebih tinggi daripada murid laki-laki (Kementerian PPPA, 2023). Hal ini disebabkan oleh pemahaman pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya sama tentang definisi kekerasan, cakupan pemberian hukuman, dan siapa yang paling berisiko mengalami kekerasan. Sekolah pun enggan melaporkan kasus perundungan dan kekerasan karena risiko nama baik dan reputasi.

Selain itu, persepsi terhadap perilaku, peran, dan tanggung jawab murid masih terbatas pada norma dan stereotip gender tradisional. Misalnya, dalam hal kepemimpinan, murid laki-laki yang hampir selalu dipilih menjadi ketua kelas, tanpa mempertimbangkan potensi murid perempuan. Persepsi dan perlakuan yang merefleksikan ketidaksetaraan ini menjadi salah satu faktor yang membatasi pencapaian murid perempuan dalam pembelajaran.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 4.186 murid penyandang disabilitas, hanya 5% di antaranya yang belajar di sekolah inklusi—sisanya belajar di sekolah non-inklusif, sekolah luar biasa (SLB), atau tidak sekolah (BPS & Kemendikbud, 2023). Bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai, guru dan kepala sekolah belum menyediakan materi dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta stigma sosial tentang disabilitas terus berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, masih banyak pula murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid hanya bisa berbahasa Sunda, dan murid dengan orang tua merantau (pekerja migran) atau berpisah.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)² Kabupaten Cirebon mencapai 144,56 dari 250, jauh di atas indeks Jawa Barat (123,16) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Berdasarkan analisis dari data tersebut, jenis bencana yang paling berisiko adalah cuaca ekstrim, banjir dan abrasi, serta kebakaran lahan.

Pemangku kepentingan dan masyarakat memahami perubahan iklim sebagai kejadian bencana alam yang memiliki dampak fisik, tetapi belum mengetahui dampak jangka panjangnya, seperti gagal panen hingga berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Pendidikan perubahan iklim di sekolah difokuskan pada pengenalan dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan seperti menanam pohon dan daur ulang sampah. Namun, kegiatan ini belum menyentuh pada tingkat kesadaran dan pelibatan masyarakat atau komunitas. Akibatnya, belum ada perubahan perilaku dari komunitas setempat, yang membuat tindakan/program adaptasi dan mitigasi belum terlaksana secara optimal.

² Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Kemiskinan

merupakan salah satu penyebab utama terjadinya eksploitasi perempuan dan perkawinan anak, kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi, kekurangan fasilitas pendukung bagi murid penyandang disabilitas, serta rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi dan dukungan emosional dari orang tua atau pengasuh.



Keterbatasan

akses informasi di daerah terpencil menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran yang dapat melanggengkan praktik diskriminasi terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.



Perubahan iklim

memicu intensitas dan frekuensi kejadian bencana. Kondisi ini berdampak pada tingkat kehadiran murid yang tinggal dan bersekolah di daerah rawan bencana, beban kerja domestik perempuan dan anak perempuan, serta aksesibilitas penyandang disabilitas.

Kolaborasi INOVASI dan ekosistem pendidikan di Kabupaten Cirebon telah mendorong terciptanya lingkungan belajar yang inovatif dan inklusif, lingkungan yang memberi ruang bagi semua anak, tanpa terkecuali, untuk tumbuh dan belajar sesuai potensi mereka. Upaya ini juga memperkuat karakter generasi muda dalam semangat kebhinekaan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan. Langkah bersama ini sejalan dengan komitmen kami untuk membangun masyarakat yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan tanpa meninggalkan jati diri budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama Cirebon.

— Drs, H. Imron, M.Ag, Bupati Kabupaten Cirebon pada Kegiatan Joint Visit Kabupaten Cirebon, 28 Agustus 2025



Dua siswi berangkat ke sekolah melewati deretan perahu nelayan di pesisir Cirebon. Di Tengah perubahan lingkungan, anak-anak tetap semangat belajar dan bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. (©Edy Purnomo/INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

INOVASI memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah Kabupaten Cirebon demi mewujudkan lingkungan belajar murid yang mendukung tumbuh kembang mereka:



Dinas Pendidikan dan Komisi Perlindungan Anak: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

- a. a. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten. Satgas akan bekerja sama dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang telah dibentuk di setiap sekolah, sehingga bisa mendukung dan mengawasi penerapan program pencegahan, proses pelaporan dan penanganan kekerasan, memfasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan murid, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid yang terlibat.
- b. Memperkuat kapasitas dan peran Satgas agar dapat menjadi garda terdepan pelaporan dan penanganan kasus kekerasan serta perlindungan anak, orang tua, dan sekolah.



Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

- a. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat, melalui dashboard Profil Belajar Siswa. Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan pemenuhan akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
- b. Memastikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di kabupaten berjalan secara optimal di masing-masing kecamatan agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
- c. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi ekosistem pendidikan Kabupaten Cirebon. Isu-isu yang saling beririsan ini memerlukan kerja sama lintas sektor, sehingga penerapan kebijakan dan pemberian bantuan bisa komprehensif dan tepat sasaran.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin

- a. Melakukan sosialisasi program dan bantuan secara langsung ke masyarakat, terutama keluarga bagi murid dari keluarga miskin dan yang pengasuhannya dilakukan bukan oleh keluarga inti. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
- b. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan serta program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

- a. Mengaplikasikan kebijakan dan praktik baik perubahan iklim di tingkat nasional dan provinsi sebagai kebijakan, rencana, dan program kegiatan di tingkat kabupaten. Misalnya, integrasi pendidikan perubahan iklim ke kurikulum pendidikan, rencana respons dan evakuasi bencana, praktik konservasi air dan energi, pendanaan untuk aksi iklim dan advokasi, dan pelatihan guru lainnya yang relevan.
- b. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital. Dengan demikian, panduan dan rencana yang telah dibuat pemerintah terkait bisa dipahami, dan kemudian meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat.
- c. Mengoptimalkan kesiapsiagaan instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah kecamatan lintasan sungai yang rentan mengalami bencana banjir.